Reinventing: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol 3, No. 1, 2025, pp. 62-73
https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/reinventing
©Ilmu Pemerintahan FISIP Untad

Sinergi Kemitraan Pemerintah Desa Dan Komunitas Lokal Dalam Menggerakan Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya: Studi Kerajinan Batik Bomba Di Desa Towale

Ayu Ramadani [1,*]; Muh. Nawawi [2]; Sulfitri Husain[3]
[1] Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Tadulako, Palu
[2] Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Tadulako, Palu
*Correspondence : ramadhani31@gmail.com

ARTICLE INFO:
Kata kunci: *Kemitraan Pemerintah Desa, Ekonomi Lokal, Pemeberdayaan Masyarakat, Batik Bomba*

Received. : 26 Juli, 2025
Revised. : 03 Agustus, 2025
Accepted : 05 Agustus, 2025

ABSTRAK

Kerajinan tenun kain Batik Bomba di Desa Towale, Kabupaten Donggala, merupakan warisan budaya dengan potensi ekonomi lokal yang besar, namun masih dihadapkan pada tantangan persaingan ketat dan keterbatasan permintaan, yang menghambat peningkatan pendapatan keluarga. Maka dari itu, tujuan penelitian ini untuk menganalisis secara mendalam efektivitas kemitraan antara Pemerintah Desa Towale dan Kelompok Yamamore dalam menggerakkan ekonomi lokal melalui pengelolaan kerajinan tenun kain Batik Bomba. Teori yang digunakan adalah prinsip kemitraan Ros Tennyson (1998). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan kunci yang berpartisipasi dalam penelitian ini adalah enam orang, terdiri dari Kepala Desa Towale, Sekretaris Desa Towale, Ketua Kelompok Yamamore, Sekretaris Kelompok Yamamore, Anggota Kelompok Yamamore, dan Pembeli Kain Tenun. Hasil penelitian ini menemukan/menunjukkan bahwa kemitraan antara Pemerintah Desa Towale dan Kelompok Yamamore berhasil menggerakkan ekonomi lokal, ditandai dengan peningkatan upah penenun dari Rp 150.000 (2020-2023) menjadi Rp 650.000 per sarung (2024-2025). Dukungan dari Bank Indonesia berupa galeri tenun dan pameran, serta dana CSR dari Bank Sulteng untuk bahan baku, sangat berperan dalam perluasan akses pasar dan peningkatan pendapatan. Meskipun demikian, terdapat tantangan terkait transparansi pengelolaan dana di mata beberapa anggota kelompok, dan pengrajin menyatakan bahwa pendapatan menenun belum sepenuhnya menopang kehidupan mereka sebagai mata pencarian utama. Implikasi penelitian ini bagi pihak yang memperoleh manfaat adalah bahwa kemitraan yang kuat antara pemerintah desa dan kelompok masyarakat dapat secara signifikan mendorong ekonomi lokal dan melestarikan budaya, memberikan harapan peningkatan kesejahteraan bagi pengrajin tenun. Namun, untuk keberlanjutan yang lebih baik, perlu ada peningkatan transparansi dalam pengelolaan dana dan strategi yang lebih komprehensif untuk memastikan pendapatan dari menenun dapat sepenuhnya menopang kehidupan, memperkuat kemandirian ekonomi desa secara berkelanjutan.

ABSTRACT

The Bomba Batik weaving craft in Towale Village, Donggala Regency, is a cultural heritage with great local economic potential, but it still faces the challenges of fierce competition and limited demand, which hinders the increase in family income. Therefore, the purpose of this study is to analyze in depth the effectiveness of the partnership between the Towale Village Government and the Yamamore Group in driving the local economy

through the management of the Bomba Batik weaving craft. The theory used is the partnership principle of Ros Tennyson (1998). This study employed a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation. Six key informants participated in the study: the Towale Village Head, the Towale Village Secretary, the Yamamore Group Leader, the Yamamore Group Secretary, a Yamamore Group Member, and a Woven Fabric Buyer. The results of this study found/showed that the partnership between the Towale Village Government and the Yamamore Group successfully stimulated the local economy, marked by an increase in weavers' wages from IDR 150,000 (2020-2023) to IDR 650,000 per sarong (2024-2025). Support from Bank Indonesia in the form of a weaving gallery and exhibitions, as well as CSR funds from Bank Sulteng for raw materials, played a significant role in expanding market access and increasing income. However, there are challenges related to the transparency of fund management in the eyes of some group members, and artisans stated that income from weaving does not fully support their lives as their main livelihood. The implications of this research for beneficiaries are that strong partnerships between village governments and community groups can significantly boost local economies and preserve culture, offering hope for improved welfare for weavers. However, for greater sustainability, there needs to be increased transparency in fund management and a more comprehensive strategy to ensure that income from weaving can fully sustain livelihoods, strengthening village economic independence in a sustainable manner.

Introduction / Pendahuluan

Pemerintah Desa memiliki peran krusial dalam mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal, khususnya melalui inisiatif pengembangan ekonomi lokal berbasis komunitas. Di Desa Towale, Kabupaten Donggala, kerajinan tenun kain Batik Bomba merupakan warisan budaya leluhur yang telah diturunkan secara turun-temurun, memiliki potensi besar untuk menggerakkan perekonomian lokal. Meskipun demikian, pengembangan usaha kerajinan tenun ini masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti persaingan ketat dan keterbatasan permintaan, yang menyebabkan potensi peningkatan pendapatan keluarga belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana kemitraan antara Pemerintah Desa Towale dan Kelompok Yamamore dapat secara efektif menggerakkan ekonomi lokal melalui pengelolaan kerajinan tenun kain Batik Bomba.

Pengembangan ekonomi lokal (PEL) merupakan pendekatan strategis yang memungkinkan pemerintah lokal dan komunitas mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya. Menurut Shrestha et al (2022), PEL memiliki dampak pada pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja baru, dan menurunkan tingkat pengangguran, yang berujung pada peningkatan pendapatan Masyarakat. Selain itu, melalui skema pemberdayaan dan kewirausahaan, PEL dapat mendorong perubahan pola pikir, serta pelestarian budaya dan lingkungan (Novandi & Adi, 2021; Sakinah et al., 2024).

Kain tenun Batik Bomba di Desa Towale, Kabupaten Donggala, merupakan salah

Copyright © 2025, Reinventing: Jurnal Ilmu Pemerintahan
2337-4468 (ISSN Print)

satu manifestasi nyata potensi ekonomi lokal dan ekspresi budaya Sulawesi Tengah. Dikenal sejak abad ke-16 Masehi, Batik Bomba sarat dengan nilai-nilai sejarah dan filosofi hidup masyarakat Kaili, menjadikannya warisan turun-temurun yang penting. Kekayaan budaya ini semakin mendapat sorotan global ketika digunakan oleh *Chief Executive Officer* Tesla, Elon Musk, pada B20 Summit tahun 2022 dan *World Water Forum* tahun 2024, yang menjadikannya perbincangan publik (nanang, 2024). Seiring perkembangannya, Batik Bomba tidak hanya berfungsi sebagai simbol budaya, tetapi juga telah berkembang menjadi sumber penghasilan signifikan bagi masyarakat setempat. Transformasi ini terlihat jelas dari peningkatan pendapatan para penenun, yang berpotensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sebelum tahun 2023, upah yang diterima penenun relatif rendah, namun terjadi kenaikan substansial pada tahun-tahun berikutnya. Perubahan ini mengindikasikan adanya dinamika positif dalam industri tenun lokal.

Table 1
Perkembangan Upah Penenun Kelompok Yamamore

No	Tahun	Upah Per Sarung (Rp)
1.	2020-2023	Rp. 150.000
2.	2024-2025	Rp. 650.000

Sumber: Kelompok Yamamore

Komunitas Yamamore menjadi entitas kunci dalam menggerakkan industri tenun di Desa Towale. Nama 'Yamamore' sendiri berasal dari Bahasa lokal yang berarti 'ingat sarung'. Kelompok ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Towale pada tanggal 18 Februari 2020, tepatnya saat penjualan kain tenun mengalami penyusutan pendapatan akibat pandemi covid-19. Dengan kata lain, kelompok ini selain sebagai komunitas pelestarian budaya, juga sebagai media untuk membantu perekonomian keluarga. Selain dari pemerintah desa, kelompok ini juga di intervensi oleh berbagai pihak melalui CSR, baik dari Bank Indonesia maupun Bank Sulteng, upaya yang dilakukan ini membuahkan hasil melalui peningkatan pendapatan penenun (lihat tabel 1).

Namun, meskipun adanya dukungan dan peningkatan upah tersebut, potensi penuh kerajinan tenun Batik Bomba untuk secara optimal meningkatkan pendapatan dan menopang kehidupan para penenun sebagai mata pencarian utama belum sepenuhnya tercapai. Tantangan seperti persaingan pasar yang ketat dan keterbatasan akses terhadap permintaan yang lebih luas masih menjadi hambatan krusial. Akibatnya, keberlanjutan dan dampak maksimal dari kemitraan yang ada dalam menggerakkan ekonomi lokal melalui sektor tenun ini masih menjadi pertanyaan yang belum terjawab secara komprehensif.

Kesenjangan ini penting untuk diteliti karena, pertama, tanpa pemahaman

Copyright © 2025, Reinventing: Jurnal Ilmu Pemerintahan
2337-4468 (ISSN Print)

mendalam tentang efektivitas dan dinamika kemitraan yang ada, upaya pengembangan ekonomi lokal melalui kerajinan tenun berisiko tidak mencapai potensi maksimalnya. Kedua, meskipun ada peningkatan upah, jika pendapatan tersebut belum cukup untuk menopang kehidupan sebagai mata pencarian utama, hal ini mengindikasikan adanya inefisiensi dalam model kemitraan yang perlu diidentifikasi.

Penelitian tentang kemitraan antara pemerintah dan masyarakat telah banyak dilakukan dalam literatur Ilmu Pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan upaya pengembangan ekonomi lokal. Studi-studi sebelumnya menyoroti berbagai aspek kemitraan, mulai dari pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hingga penyaluran bantuan sosial. Misalnya, penelitian oleh Ningrum (2021) mengkaji kemitraan Pemerintah Desa dan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes Sedyo Mulyo, dengan penekanan pada prinsip kesetaraan, keterbukaan, dan asas manfaat bersama, menunjukkan adanya dominasi dalam pengambilan keputusan meskipun kemitraan membawa manfaat timbal balik. Senada dengan itu, Jannah 2024) juga mengevaluasi efektivitas pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan ekonomi, menemukan bahwa meskipun ada upaya penciptaan lapangan kerja dan pengembangan usaha, indikator efektivitas belum sepenuhnya terpenuhi karena unit usaha yang terbatas.

Di sisi lain, aspek efektivitas kemitraan dalam konteks yang lebih luas juga telah menjadi perhatian. Rasdi & Kurniawan (2020) meneliti efektivitas kemitraan pemerintah dan swasta dalam penyaluran bantuan sosial, menemukan bahwa efektivitas belum sepenuhnya tercapai karena kendala pada dimensi akuntabilitas, akses, dan responsivitas, meskipun ada nilai bisnis dan insentif yang efektif. Sementara itu, Ikhsan (2018) menyoroti pola kemitraan antara pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat, mengidentifikasi bahwa komunikasi yang kurang baik di tahap awal dapat menghambat produktivitas kemitraan.

Meskipun berbagai studi diatas telah memberikan wawasan berharga mengenai prinsip-prinsip kemitraan, seperti kesetaraan, transparansi, dan saling menguntungkan dan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya, masih terdapat celah dalam pemahaman mengenai dinamika kemitraan yang spesifik pada pengembangan ekonomi lokal berbasis kerajinan tangan tradisional yang memiliki nilai budaya kuat. Penelitian ini memfokuskan kajian pada kemitraan antara Pemerintah Desa Towale dan Kelompok Yamamore dalam upaya menggerakkan ekonomi lokal melalui pengelolaan kerajinan tenun kain Batik Bomba. Secara geografis, studi ini berlokasi spesifik di Desa Towale, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala.

Batasan waktu penelitian ini mencakup periode kemitraan dan dampak yang ditimbulkan oleh program pengembangan kerajinan tenun Batik Bomba, dengan data mencakup perkembangan sejak pembentukan Kelompok Yamamore pada tahun 2020 dan peningkatan upah penenun hingga tahun 2025. Secara tematis, penelitian ini menganalisis kemitraan tersebut berdasarkan tiga prinsip utama yang dikemukakan

Copyright © 2025, Reinventing: Jurnal Ilmu Pemerintahan
2337-4468 (ISSN Print)

oleh Ros Tennyson (1998), yakni kesetaraan atau keseimbangan yang mengacu pada hubungan yang didasari oleh saling menghormati, menghargai, dan percaya, serta menghindari pendekatan top-down atau bottom-up yang didasarkan pada kekuasaan semata. Kemudian, transparansi yang merujuk pada keterbukaan informasi dan pengelolaan yang jelas untuk menghindari kecurigaan antar mitra kerja, mencakup transparansi pengelolaan informasi dan pengelolaan keuangan. Dan terakhir, saling menguntungkan dimana prinsip ini menegaskan bahwa setiap kemitraan harus membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat, didasarkan pada prinsip simbiosis mutualisme dan penciptaan nilai tambah bersama yang berkelanjutan.

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, penelitian ini memiliki urgensi untuk secara komprehensif menganalisis dinamika kemitraan antara Pemerintah Desa Towale dan Kelompok Yamamore dalam konteks pengembangan ekonomi lokal melalui kerajinan tenun kain Batik Bomba. Rasionalisasi penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami lebih dalam bagaimana kolaborasi multi-pihak dapat dioptimalkan untuk mencapai kesejahteraan berkelanjutan di tingkat desa, terutama di tengah tantangan pasar dan perlunya pelestarian budaya. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam efektivitas kemitraan antara Pemerintah Desa Towale dan Kelompok Yamamore dalam menggerakkan ekonomi lokal melalui pengelolaan kerajinan tenun kain Batik Bomba.

Method / Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif, yang bertujuan untuk menggali dan menganalisis secara mendalam fenomena kemitraan antara Pemerintah Desa Towale dan Kelompok Yamamore dalam menggerakkan ekonomi lokal melalui pengelolaan kerajinan tenun kain Batik Bomba. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami kompleksitas perilaku, tindakan, serta narasi subjek penelitian dalam konteks alami mereka, sebagaimana diungkapkan melalui teks, gambar, dan bahasa verbal(Denzin & Lincoln, 2003; Hesse-Biber & Leavy, 2003; Leavy, 2014). Desain deskriptif diterapkan untuk menyajikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai karakteristik dan hubungan yang ada dalam fenomena tersebut.

Lokasi penelitian ini difokuskan di Desa Towale, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala. Pemilihan 66okasi ini didasarkan pada keberadaan pola kemitraan yang teridentifikasi antara pemerintah desa dan Kelompok Yamamore dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal melalui kerajinan tenun. Penelitian ini dilaksanakan dengan menyesuaikan efektivitas dan efisiensi waktu yang dibutuhkan, serta mempertimbangkan ketersediaan waktu informan dan peneliti.

Data penelitian diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi (Allmark et al., 2009; Deterding & Waters, 2021; Hasanah, 2017). Proses pemilihan informan menggunakan teknik *purposive* (Ahmad & Wilkins, 2025), di mana individu dipilih berdasarkan keterlibatan langsung dan pengetahuan substansial mereka terkait kemitraan dalam menggerakkan

Copyright © 2025, Reinventing: Jurnal Ilmu Pemerintahan
2337-4468 (ISSN Print)

ekonomi lokal. Sebanyak enam informan kunci berpartisipasi dalam penelitian ini, terdiri dari, Mohammad Subhan, S.H. sebagai Kepala Desa Towale, Munawir sebagai Sekretaris Desa, Roslina sebagai Ketua Kelompok Yamamore, Muslimah sebagai Sekretaris Kelompok Yamamore, Ratu Balges Anggota Kelompok Yamamore, dan Ibu Mardina sebagai konsumen atau pembeli Kain Tenun. Kredibilitas informan ini sangat esensial karena mereka memiliki wawasan, pengalaman, dan informasi faktual yang relevan untuk memperkuat hasil analisis.

Analisis data kualitatif dalam penelitian ini dilakukan mengikuti model interaktif yang dikembangkan oleh Miles et al (2014). Proses analisis ini melibatkan empat tahapan yang saling terkait dan simultan. Tahap pertama adalah Pengumpulan Data atau *Data Collection*. Pada fase awal ini, peneliti secara aktif mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Fokus utama pengumpulan data adalah pada informasi yang berkaitan dengan kemitraan antara Pemerintah Desa dan Kelompok Yamamore, termasuk bentuk dukungan yang diberikan oleh pemerintah serta dampak kemitraan tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat. Setelah data terkumpul, tahapan berikutnya adalah Kondensasi Data. Pada tahap ini, peneliti melakukan reduksi data dengan cara memilih informasi yang paling relevan dengan tujuan penelitian. Ini mencakup data-data spesifik mengenai kemitraan itu sendiri dan dampaknya terhadap pendapatan serta kesejahteraan masyarakat. Informasi yang telah dipilih kemudian diorganisir ke dalam bentuk yang lebih terstruktur, seperti kategori atau tema, sementara informasi yang dianggap tidak relevan atau berlebihan dihapus untuk menjaga fokus analisis.

Selanjutnya, Penyajian Data atau *Data Display* dilakukan. Data yang telah dikondensasi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menjelaskan temuan-temuan penting dari wawancara dan observasi. Selain narasi, peneliti juga dapat memanfaatkan tabel atau grafik untuk menyajikan data statistik, misalnya untuk menunjukkan jumlah anggota kelompok Yamamore dari tahun ke tahun atau untuk membandingkan pendapatan sebelum dan sesudah adanya kemitraan. Tahap terakhir adalah Penarikan Kesimpulan atau *Conclusion Drawing*. Pada fase ini, peneliti menarik kesimpulan dengan mencari pola atau hubungan antar data yang telah diperoleh. Contohnya, bagaimana dukungan dari Bank Indonesia dan Bank Sulteng berkontribusi pada peningkatan pendapatan pengrajin tenun dapat diidentifikasi. Kesimpulan yang diambil kemudian dikaitkan dengan teori kemitraan yang relevan, khususnya tiga prinsip penting dari Ros Tennyson (1998), yakni kesetaraan atau keseimbangan, transparansi, dan saling menguntungkan. Seluruh proses analisis ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh mengenai fenomena yang diteliti.

Copyright © 2025, Reinventing: Jurnal Ilmu Pemerintahan
2337-4468 (ISSN Print)

Result and Discussion / Hasil dan Pembahasan

1. Kesetaraan terkait Kemitraan Pemerintah Desa dan Kelompok Yamamore dalam Menggerakan Ekonomi Lokal di Desa Towale

Pada prinsip ini, temuan menunjukkan bahwa program yang dirancang untuk memastikan kesetaraan manfaat dalam kemitraan ini melibatkan dukungan signifikan dari Bank Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh Subhan S.H, Kepala Desa Towale: "Program yang telah kami rancang untuk memastikan kesetaraan manfaat antara Pemerintah Desa dan kelompok Yamamore dalam kemitraan ini melibatkan Bank Indonesia. Bank Indonesia sendiri memberikan bantuan seperti galeri tenun di Desa Towale dimana tempat tersebut sebagai tempat penjualan hasil tenunnya. Selain itu, kami juga megadakan pameran tenun sebagai sarana promosi agar tenun dikenal lebih luas dan mendapatkan peningkatan penjualan.

Manfaat dari kerja sama ini, menurut Munawir, Sekretaris Desa, adalah penyediaan tempat penjualan (galeri tenun) bagi pengrajin yang dikelola oleh pengurus desa. Beliau menjelaskan: "Penyediaan tempat penjualan yang dibantu dengan pihak Bank Indonesia yaitu galeri tenun, apabila ada sarung yang sudah dibuat oleh pengrajin maka di bawalah ke galeri itu untuk dikelola oleh pengurus desa dan terkait keuntungan atau bagi-bagi hasilnya kita tidak ada, hanya sekedar bantu-bantu masyarakat. Kemudian dampak yang dirasakan sangat baik yah ada peningkatan ekonomi, dulu pengrajin masih susah dalam penjualan dan setelah adanya kerjasama ini pemerintah dan pelaku begitu sarung sudah jadi langsung dibayar. Dulu itu masih susah kadang sarung hasil tenun itu menumpuk karena pembelinya masih kurang.". Evaluasi rutin terhadap aspek kesetaraan kemitraan dilakukan secara berkala. Munawir menambahkan: "Yah selalu, kita selalu mengevaluasi biasa yang dilakukan seperti ada keluhan-keluhan atau kekurangan seperti kenapa bisa begini harga sarungnya, yang dulunya apa namanya biasa kadang membeli langsung kepada pelaku sehingga dibicarakan lah untuk solusinya supaya tidak ada perbedaan baik yang pihak sebelah dengan yang pihak lain. Itu semua yang kita selesaikan melalui pertemuan dengan musyawarah. Kemudian Pemerintah Desa juga menguatkan dengan surat keputusan Kepala Desa itu bahwa mereka itu sudah di SK kan secara legalitas agar mereka punya dasar".

Dari sisi anggota kelompok, Ratu Balges melaporkan peningkatan pendapatan: "Peningkatan pendapatan alhamdulillah sudah cukup baik cuman terkadang terkendala di benang yang di pesan kadang lambat datang jadi proses menenunnya juga ikut terhambat. Sedangkan proses pembuatan 1 sarung kurang lebih 1 minggu pengerjaan.". Beliau juga menyatakan bentuk dukungan yang diterima: "Sebagai anggota pengrajin, kami memang menerima berbagai bentuk dukungan dari kemitraan ini. Salah satu dukungan utama yang kami terima adalah bantuan modal, yang sangat membantu kami dalam proses produksi sarung tenun. Selain itu, kami juga mendapatkan akses pasar yang lebih luas, terutama dengan adanya galeri tenun yang berikan dari pihak Bank Indonesia itu dan dikelola oleh pengurus desa. Dengan adanya akses pasar yang lebih baik, kain tenun kami bisa langsung di jual dan dibayar tidak harus ba tunggu lama, sehingga meningkatkan kesejahteraan kita sebagai pengrajin tenun.". Muslimah, Sekretaris Kelompok Yamamore, berbagi pengalamannya: "Saya salah satu orang yang menjadi regenerasi penenun di Desa Towale, awal mula menenun sejak kelas 1 SMP dan saya mampu membiayai sekolah saya sampai lulus kuliah tanpa bantuan dari orang tua dan semua itu hasil dari kerja keras saya dalam menekuni pekerjaan menenun ini.". Roslina, Ketua Kelompok Yamamore, merinci dukungan yang diterima: "Ooh kalau dari Bank Indonesia 5 buah tempat ba tenun, 5 alat tenun ATBM, 1 galeri tenun kalau dari Bank Indonesia itu. Eh kalau dari Bank Sulteng itu lalu kita dana CSR senilai 250 juta untuk dibelikan bahan baku seperti benang.". Dari perspektif pembeli, Mardina menyatakan: "Ohh, kalau menurut saya yah, harga yang ditawarkan itu sebanding sama kualitas kain yang saya terima. Kainnya bagus, jahitannya rapi, jadi saya rasa harganya pas.".

Model kemitraan ini menunjukkan karakteristik "kemitraan mutualistik" seperti yang dijelaskan oleh Sulistiyani (2004), di mana kedua belah pihak menyadari pentingnya kerja sama untuk mendapatkan manfaat bersama. Pemerintah desa mendapatkan peningkatan reputasi dan pengakuan sebagai desa wisata , sementara kelompok Yamamore mendapatkan peningkatan pendapatan dan

Copyright © 2025, Reinventing: Jurnal Ilmu Pemerintahan
2337-4468 (ISSN Print)

akses pasar. Konsensus dalam evaluasi melalui musyawarah untuk mengatasi perbedaan harga sarung menunjukkan upaya aktif untuk menjaga keseimbangan dan mencegah dominasi satu pihak, sejalan dengan temuan Ain Ulifah Widia Ningrum (2021) yang menyoroti pentingnya prinsip kesetaraan dalam pengelolaan kemitraan. Hal ini mengindikasikan bahwa hubungan dibangun atas dasar saling menghormati dan percaya, bukan semata-mata kekuasaan, yang merupakan esensi dari prinsip kesetaraan Tennyson (1998).

2. Transparansi terkait Kemitraan Pemerintah Desa dan Kelompok Yamamore dalam Menggerakan Ekonomi Lokal di Desa Towale

Mengenai transparansi informasi, Mohammad Subhan S.H melaporkan, "kami secara rutin menyampaikan kepada kelompok Yamamore melalui evaluasi-evaluasi yang dilakukan secara berkala dalam rapat pertemuan. Rapat ini melibatkan baik masyarakat desa maupun anggota kelompok Yamamore sebagai wadah untuk membahas perkembangan, kendala, serta langkah-langkah yang perlu diambil dalam kemitraan. Dengan pertemuan ini, komunikasi antara pemerintah desa dan kelompok Yamamore tetap terbuka dan transparan, sehingga mereka selalu mendapatkan informasi terkini dan dapat berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan maupun evaluasi program kemitraan.". Munawir menambahkan: "Iya Transparansi, kemudian yang menyampaikan informasi kepada kelompok tenun dari pokdarwis. Kalau terkait kapan informasi di sampaikan itu pertemuannya baru di lakukan pada bulan januari kemarin, dalam pertemuannya yang di hadiri masyarakat umum sekaligus anggota-anggota kelompok yamamore kita selalu mengadakannya di rumah adat yang samping rumah pak kades itu.".

Namun, terkait transparansi pengelolaan dana, terdapat perbedaan pandangan. Ratu Balges mengungkapkan: "Aihh kalau itu saya belum dapat informasi yang lengkap terkait pengelolaan dana dalam kemitraan ini dek. Cuman dibilangnya saja sama pak kades kalau ada bantuan di kasi.". Senada dengan itu, Muslimah menyatakan: "Transparansi pengelolaan dana belum ada karena penenun baru-baru ini hanya menerima dana bantuan saja. Untuk antara desa dengan penenun belum ada karena menenun ini rata-rata pake pribadi punya dan tidak ada bagi hasil.". Berbeda pandangan, Roslina, Ketua Kelompok Yamamore, menegaskan: "Iya transparansi, semua informasi dana akan diberitahukan ke semua anggota karena mereka semua dapat. 250 juta itu di belikan bahan baru semua anggota yang terima, orang per orang di kasih begituu dan kita juga sering rapat di rumah adat kalau ada keluhan-keluhan dari anggota.". Dari sisi pembeli, Mardina menyatakan: "Informasi yang saya terima tentang harga, kualitas, sama bahan kain tenun itu cukup jelas karena saya sering baku wa dengan penjualnya juga. Penjual biasanya kasih tahu harga dan sedikit tentang kualitas kainnya. Tapi kadang ada yang kurang jelas, misalnya tentang bahan spesifiknya. Jadi, saya sering tanya lebih lanjut biar lebih paham. Secara keseluruhan, oke lah.".

Dalam konteks transparansi informasi, temuan menunjukkan adanya upaya yang sistematis dari Pemerintah Desa untuk secara rutin memperbarui dan menyampaikan informasi kepada Kelompok Yamamore melalui rapat evaluasi berkala. Forum-forum ini, yang melibatkan masyarakat dan anggota kelompok, berfungsi sebagai wadah komunikasi terbuka mengenai perkembangan, kendala, dan langkah-langkah kemitraan. Keterbukaan ini sejalan dengan pandangan Wibisono (2007) bahwa transparansi adalah kunci untuk menghindari kecurigaan antar mitra. Namun, terdapat inkonsistensi yang signifikan dalam transparansi pengelolaan dana. Meskipun Ketua Kelompok Yamamore (Roslina) menyatakan bahwa informasi dana sebesar 250 juta rupiah transparan dan diberitahukan kepada seluruh anggota, dengan pembagian bahan baku secara individu, dua anggota lainnya (Ibu Ratu Balges dan Ibu Muslimah) secara eksplisit menyatakan belum mendapatkan informasi lengkap atau bahwa transparansi pengelolaan dana belum ada karena dana bantuan diterima secara langsung dan tidak ada sistem bagi hasil. Kesenjangan ini mengindikasikan adanya dislokasi informasi antara tingkat kepemimpinan kelompok dan anggotanya, yang berpotensi menimbulkan kecurigaan dan mengurangi efektivitas kemitraan dalam jangka panjang. Temuan ini kontras dengan harapan Nur Ikhsan (2018) dan Ain Ulifah Widia Ningrum (2021) yang menekankan pentingnya komunikasi yang baik dan

Copyright © 2025, Reinventing: Jurnal Ilmu Pemerintahan
2337-4468 (ISSN Print)

keterbukaan dalam kemitraan untuk mencegah hambatan produktivitas. Meskipun pembeli (Ibu Mardina) merasa informasi harga dan kualitas cukup jelas, transparansi internal pengelolaan dana di antara mitra inti masih memerlukan perbaikan.

3. Saling Menguntungkan terkait Kemitraan Pemerintah Desa dan Kelompok Yamamore dalam Menggerakan Ekonomi Lokal di Desa Towale

Mengenai prinsip saling menguntungkan, Mohammad Subhan S.H menjelaskan: "Iyaa, Manfaat konkret yang telah dirasakan oleh pemerintah desa dan kelompok Yamamore adalah adanya peningkatan pendapatan bagi kelompok Yamamore yang mampu menambah uang belanja anak, kelompok pengrajin tenun juga dapat mengembangkan usaha mereka dengan dukungan fasilitas seperti galeri tenun dan kegiatan promosi yang membuat produk tenun semakin dikenal dan diminati pasar. Bagi pemerintah desa, memberikan dampak positif seperti dikenalnya Desa Towale secara lebih luas, terutama sebagai desa wisata yang memiliki potensi kerajinan tenun tradisional sebagai daya tarik desa towale. Semakin terkenalnya desa ini tidak hanya mendukung pengembangan ekonomi lokal tetapi juga memperkuat posisi Desa Towale sebagai destinasi wisata yang berkelanjutan di Kabupaten Donggala.". Munawir menambahkan: "Manfaatnya sungguh sangat luar biasa, karena manfaatnya itu sudah kita alami sejak kita dihargai di salah satu pemberian penghargaan Rekor MURI, bahwasanya Desa Towale sebagai pengrajin tenun terbanyak, kemudia kita nikmati hasilnya karena sudah dikenal lebih luas, dan kami juga saling memberikan masukan-masukan antar kelompok tenun, apapun yang terjadi kita selalu berkoordinasikan dengan baik. Kalau dari penenunnya tentunya pendapatan mereka sudah pasti meningkat walaupun belum sepenuhnya menopang kehidupan mereka dan penghasilan utamanya rata-rata dari pekerjaan suaminya sebagai nelayan.".

Namun, dari perspektif anggota, Ratu Balges menyatakan: "Sebagai hasil dari kemitraan ini saya belum merasakan peningkatan yang terlalu di saya. Pendapatan dari menenun memang ada, tapi belum cukup sepenuhnya untuk kebutuhan sehari-hari keluarga saya. Usaha menenun ini lebih sebagai pendapatan tambahan, sementara penghasilan utama masih dari pekerjaan suamiku jadi nelayan. Untuk penjualan hasil tenun, kami bekerja sama dengan Bank Indonesia yang memfasilitasi tempat penjualan, seperti rumah tenun yang disediakan untuk kelompok pengrajin di Desa Towale. Kerja sama ini sangat membantu dalam memasarkan produk kami ke pasar yang lebih luas, walaupun kadang pembeli banyak kadang tidak stabil sama persaingan penjualan masih ada saja.". Muslimah juga mengungkapkan, "Kalau soal peningkatan penghasilan hmm belum juga, yahh 50% lah karena ini juga saya tidak selalu dapat orderan karena kita penenun ini banyak toh, jadi menenun ini belum sepenuhnya mampu menopang biaya kehidupan saya. kalau soal hasil penjualan karya tenun langsung ke orang yang ba pesan, pembuatan sarung tenun tergantung dari pemesanan langsung, belum ada yang saya bawa ke galeri tenun untuk dijual karena orang yang langsung datang ba pesan sama saya.".

Di sisi lain, Roslina, Ketua Kelompok Yamamore, menjelaskan perubahan signifikan dalam penjualan: "Sebelum penjualan tahun 2020 belum begini sekali tapi setelah viral sudah terkenal ini penjualan itu meningkat sekali, jauh beda dengan dulu kita masih cari pembeli itupun pembayarannya masih nyicil belum dibayar langsung. Sekarang ini yang ba pesan ada terus dulu itu kita masih ba jual di antar ke palu. Sekarang ini pembeli sendiri yang datang ba pesan langsung ada dari morowali, dari luwuk banyak sekali pemesanan yang diterima. Bahkan bukan hanya sekitaran palu sudah. Ada yang dari luar negri seperti dari jerman dan kami pernah mengatakan festival tenun setiap tahun di bulan agustus sekaligus merayakan hari ulang tahun kabupaten donggala dirangkaikan dengan hari ulang tahun tenun.". Beliau juga menginformasikan mekanisme penjualan: "Di bawah ke galeri, iya sebagian ada orang suka langsung datang memesan, biasa yang dia mau punya warna sendiri atau motifnya. Yang di bawah ke galeri memang untuk yang di jual ke masyarakat umum.". Akhirnya, Mardina, sebagai pembeli, merasakan keuntungan: "Keuntungannya banyak yah Pertama, kainnya bagus dan unik, jadi saya bisa pakai untuk acara-acara khusus. Selain itu, beli kain tenun ini juga mendukung pengrajin lokal, jadi merasa bangga begitu ee ba bantu ekonomi desa. Selain itu, kualitasnya tahan lama juga, jadi saya bisa pakai lama.".

Copyright © 2025, Reinventing: Jurnal Ilmu Pemerintahan
2337-4468 (ISSN Print)

Prinsip saling menguntungkan adalah aspek krusial yang menunjukkan keberhasilan kemitraan ini. Peningkatan pendapatan bagi Kelompok Yamamore yang mampu menambah uang belanja keluarga dan pengembangan usaha mereka dengan dukungan fasilitas merupakan bukti nyata manfaat ekonomi. Pengakuan Desa Towale sebagai pemegang Rekor MURI dan peningkatan popularitasnya sebagai destinasi wisata juga menunjukkan keuntungan bagi pemerintah desa. Fenomena ini mendukung konsep pengembangan ekonomi lokal yang menurut Shrestha et al (2022) dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan. Keuntungan bagi pembeli, seperti kualitas kain yang bagus dan dukungan terhadap pengrajin lokal, juga menggarisbawahi sifat mutualistik dari kemitraan ini, sebagaimana sejalan dengan temuan Miftahul Jannah (2024) dan Ain Ulifah Widia Ningrum (2021) yang menekankan pentingnya manfaat bersama dalam kemitraan.

Conclusion / Kesimpulan

Penelitian ini memfokuskan pada analisis kemitraan antara Pemerintah Desa Towale dan Kelompok Yamamore dalam menggerakkan ekonomi lokal melalui pengelolaan kerajinan tenun kain Batik Bomba. Tujuannya adalah untuk memahami secara mendalam bagaimana kolaborasi ini beroperasi berdasarkan prinsip kesetaraan/keseimbangan, transparansi, dan saling menguntungkan, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemitraan ini secara signifikan berhasil dalam menggerakkan ekonomi lokal. Terbukti adanya peningkatan pendapatan yang dialami oleh para pengrajin tenun dari Kelompok Yamamore. Sebelum tahun 2021, upah per sarung hanya sekitar Rp 150.000, namun telah meningkat 71rastic menjadi rata-rata Rp 650.000 per sarung pada tahun 2024-2025. Peningkatan ini didukung oleh berbagai bentuk fasilitas dan promosi dari pemerintah desa, Bank Indonesia, dan Bank Sulteng, termasuk penyediaan galeri tenun dan penyelenggaraan pameran, yang memperluas akses pasar dan meningkatkan visibilitas produk Batik Bomba. Desa Towale bahkan mendapatkan pengakuan Rekor MURI sebagai desa dengan pengrajin tenun terbanyak, yang turut memperkuat reputasinya sebagai destinasi wisata budaya.

Meskipun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian. Dalam hal transparansi pengelolaan dana, ditemukan adanya inkonsistensi informasi di antara anggota kelompok, di mana sebagian merasa belum mendapatkan informasi yang lengkap dan jelas mengenai alokasi dana bantuan, serta belum adanya sistem bagi hasil yang terstruktur. Selain itu, meskipun pendapatan meningkat, sebagian pengrajin menyatakan bahwa penghasilan dari menenun masih bersifat tambahan dan belum sepenuhnya menopang biaya hidup sebagai mata pencarian utama, ditambah dengan kendala keterlambatan bahan baku dan persaingan pasar yang ketat.

Penelitian ini berkontribusi secara substansial pada literatur ilmu pemerintahan dan pengembangan ekonomi lokal dengan memberikan analisis empiris mendalam tentang dinamika kemitraan multi-pihak dalam konteks budaya lokal yang kuat. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan kemitraan tidak hanya bergantung pada dukungan finansial dan fasilitas, tetapi juga pada komunikasi yang transparan dan upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi benar-benar dapat

Copyright © 2025, Reinventing: Jurnal Ilmu Pemerintahan
2337-4468 (ISSN Print)

menopang kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Kontribusi ini menawarkan model konseptual dan praktis bagi pembuat kebijakan dan komunitas lain yang ingin mereplikasi keberhasilan serupa, sambil tetap memperhatikan potensi hambatan yang mungkin muncul dalam implementasi prinsip-prinsip kemitraan yang sejati.

References / Referensi

Ahmad, M., & Wilkins, S. (2025). Purposive sampling in qualitative research: A framework for the entire journey. *Quality & Quantity*, *59*(2), 1461–1479. https://doi.org/10.1007/s11135-024-02022-5

Allmark, P., Boote, J., Chambers, E., Clarke, A., McDonnell, A., Thompson, A., & Tod, A. M. (2009). Ethical Issues in the Use of In-Depth Interviews: Literature Review and Discussion. *Research Ethics*, *5*(2), 48–54. https://doi.org/10.1177/174701610900500203

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2003). *Qualitative Research* (Third). SAGE Publications.

Deterding, N. M., & Waters, M. C. (2021). Flexible Coding of In-depth Interviews: A Twenty-first-century Approach. *Sociological Methods & Research*, *50*(2), 708–739. https://doi.org/10.1177/0049124118799377

Hasanah, H. (2017). Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial). *At-Taqaddum*, *8*(1), 21. https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163

Hesse-Biber, & Leavy, P. (2003). *Approaches to Qualitative Research: A Reader on Theory and Practice*. Oxford University Press.

Ikhsan, N. (2018). *Kemitraan Pemerintah Daerah Dan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Pengelolaan Rumah Hati Rumah Bakat Di Kota Makassar*. Universitas Muhammadiyah Makassar.

Jannah, A. M. (2024). *Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Ekonomi Di Desa Pattaneteang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng*. Universitas Muhammadiyah Makassar.

Leavy, P. (Ed.). (2014). *The Oxford Handbook of Qualitative Research* (1st ed.). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199811755.001.0001

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (Third edition). SAGE Publications, Inc.

nanang. (2024, May 20). Lagi, Elon Musk Kenakan Batik Bomba di WWF 2024. *Media Alkhairaat*. https://media.alkhairaat.id/lagi-elon-musk-kenakan-batik-bomba-di-wwf-2024/

Ningrum, A. U. W. (2021). Kemitraan Pemerintah Desa Menoreh Dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sedyo Mulyo Di Desa Menoreh Kecamatan Salaman. *Untidar*.

Novandi, H. R., & Adi, I. R. (2021). THE IMPACT OF LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT THROUGH COMMUNITY-BASED TOURISM ON ECONOMIC WELFARE OF THE COMMUNITY IN TAMANSARI VILLAGE, BANYUWANGI, EAST JAVA, INDONESIA. *Indonesian Journal of Social Work*, *5*(1), 1–11. https://doi.org/10.31595/ijsw.v5i1.406

Rasdi, D., & Kurniawan, T. (2020). The Effectiveness Of Public-Private Partnership In The Distribution Of Non-Cash Food Assistance Program In Bogor Regency. *Jurnal Analis Kebijakan*, *4*(1), 25–40. https://doi.org/10.37145/jak.v4i1.425

Sakinah, F., Fahlevi, R., & Rahmawati, R. (2024). PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL

Copyright © 2025, Reinventing: Jurnal Ilmu Pemerintahan
2337-4468 (ISSN Print)

MELALUI KEWIRAUSAHAAN KREATIF. *An-Nizam*, *3*(1), 226–231. https://doi.org/10.33558/an-nizam.v3i1.9678

Shrestha, O., Forsyth, O., Sihotang, M., Sihotang, M. M., & Walsham, S. (2022). Assessing the Socio-Economic Impact of Infrastructure Development on Local Communities: A Mixed-Methods Approach. *Jurnal Sosial, Sains, Terapan Dan Riset (Sosateris)*, *11*(1), 1–8. https://doi.org/10.35335/3xahcj54

Tennyson, R. (1998). *Managing Partnerships: Tools for mobilizing the public sector, business, and civil society as partners in development.* The Prince of Wales Business Leaders Forum.

Copyright © 2025, Reinventing: Jurnal Ilmu Pemerintahan
2337-4468 (ISSN Print)